

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era global sekarang ini perkembangan dunia internasional semakin berkembang dengan cepat, begitu juga dengan hubungan internasional yang terus mengalami perubahan. Perkembangan dalam hubungan internasional telah membawa banyak elemen untuk membentuk pola cara interaksi yang baru. Baik itu hubungan antar negara, hubungan kerjasama politik, ekonomi, sosial, budaya dan aspek lainnya mengalami fase perubahan dan pemberharuan.

Dalam hubungan internasional sangat berkaitan erat dengan aktivitas dan praktek diplomasi. Diplomasi merupakan sebuah alat atau media dalam mencapai kepentingan suatu negara dalam level tertentu, dimana tujuan utama dari berdiplomasi adalah untuk menciptakan perdamaian dunia dan diplomasi sebagai alat atau mesin penggerak dalam berhubungan dengan negara-negara global (Arief, 2015). Sedangkan menurut KM Panikkar dalam bukunya yang berjudul *The Principle of Diplomacy*, diplomasi dalam hubungannya dengan politik internasional merupakan seni dalam mengedepankan kepentingan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain (Roy, 1995).

Dalam berdiplomasi terdapat dua cara yaitu secara *hard power* dan *soft power*. *Hard power* dalam diplomasi yaitu berdiplomasi dalam bentuk perang, seperti agresi militer dan politik, sedangkan *soft power* dalam diplomasi yaitu diplomasi dalam bentuk penyelesaian secara damai melalui bidang kebudayaan, bahasa, persahabatan dan ekonomi (Sundari, 2017).

Akibat dari adanya perkembangan global dan situasi internasional yang terus berubah maka munculah sebuah pendekatan atau ilmu baru dalam Hubungan Internasional khususnya dalam berdiplomasi yaitu Gastrodiplomasi. Gastrodiplomasi muncul pada awal tahun 2000-an, istilah

gastrodiplomasi dipelopori oleh Rockower seorang Direktur Eksekutif Diplomasi Publik Levantine (Lipscomb, 2019). Rockower menjelaskan istilah gastrodiplomasi adalah sebuah kampanye hubungan masyarakat dan investasi bersama dan berkelanjutan oleh pemerintah dan negara bagian, yang sering kali bekerja sama dengan aktor non-negara, untuk meningkatkan nilai dan kedudukan merek bangsa mereka melalui makanan. Mudah-mudahan, gastrodiplomasi ini menggunkan makanan untuk menyebarkan informasi tentang suatu negara atau menjadikan suatu negara lebih dikenal secara global. Gastrodiplomasi ini termasuk dalam instrumen *soft power* dalam diplomasi publik karena menggunakan makanan sebagai objek utamanya dalam berdiplomasi.

Negara pertama yang melakukan gastrodiplomasi adalah Thailand dengan program “*Global Thai*” pada tahun 2000 yang kemudian di ikuti oleh negara lain seperti Denmark, Norwegia, Swedia pada tahun 2004 dengan program “*Nordic Food Movement*” karena keberhasilannya program tersebut, maka berlanjut tahun 2011 dengan munculnya “*Nordic Food Program*” dan “*Nordic Food Diplomacy*”. Jepang dengan program “*Shoku-bunka kenkyū suishin kondankai*” (*Food Research Promotion Discussion Group*) program tersebut berlangsung pada tahun 2005. Malaysia pada tahun 2006 dengan program “*The Malaysia Kitchen Program*” dan di tahun yang sama negara Peru melaksanakan program gastrodiplomasi “*Perú Mucho Gusto*” atau diartikan sebagai “Senang Bertemu dengan Peru dan “Peru, Penuh Rasa”. Dilanjutkan dengan negara Korea Selatan pada tahun 2009 dengan program “*Korean Cuisine to the World*” atau diplomasi Kimchi, kemudian Taiwan pada tahun 2010 dengan program gastrodiplomasi “*All in Good Taste; Savor the Flavors of Taiwan*” dan Australia pada tahun 2014 dengan program “*Restaurant Australia*” (Annenbreg, 2015).

Taiwan adalah salah satu negara maju di kawasan Asia Timur yang menggunakan gastrodiplomasi sebagai alat untuk mengenalkan negaranya dikancah global. Gastrodiplomasi

digunakan oleh negara-negara berkekuatan menengah atau *middle power* seperti Korea Selatan yang menggunakan gastrodiplomasi untuk mempromosikan negaranya (Heriningtyas, 2019). Mengikuti jejak Korea Selatan, Taiwan sebagai negara yang termasuk *middle power*, karena alasan keadaan negara yang sedang dialami maka gastrodiplomasi menjadi sebuah cara yang digunakan untuk mengejar suatu tujuan negaranya (Rockower P. S., *Projecting Taiwan: Taiwan's Public Diplomacy Outreach*, 2011).

Taiwan yang kita kenal memiliki julukan sebagai “Macan Asia” dikarenakan pertumbuhan ekonominya yang pesat membuat Taiwan sukses dikenal secara umum sebagai negara produsen produk berteknologi tinggi dunia (Bloomenthal, 2020). Negara Taiwan tidak hanya ingin dikenal sebagai negara yang menghasilkan produk-produk elektronik tinggi, tetapi juga ingin menjadi tempat di mana semua orang ingin datang berkunjung dan saling mengenal (Sui, 2010). Untuk mengenalkan negaranya, yang tidak hanya ingin dikenal akan produsen produk-produk industri berteknologi saja, Taiwan berusaha memperlihatkan kekayaan negaranya yang lain yaitu melalui budaya makanan atau kuliner yang mereka miliki, maka Gastrodiplomasi menjadi pilihan Taiwan untuk mencari peluang dalam berdiplomasi. Taiwan menggunakan *soft power* yaitu melalui jalur gastrodiplomasi karena adanya alasan yang menyangkut mengenai status negaranya di dunia internasional, dimana negaranya bersatatus *ambiguous* atau kedaulatan negaranya masih belum jelas. Status negara Taiwan yang masih belum jelas itu dikarenakan adanya pengakuan kepemilikan atas wilayah Taiwan oleh Tiongkok dan kedaulatan negara Taiwan tidak diakui juga oleh Tiongkok (Glaser, Mazarr, Glennon, & Sacks, 2020). Secara resmi memang banyak negara yang belum mengakui Taiwan sebagai sebuah negara berdaulat secara *de jure*, dimulai dari 25 negara kemudian berangsur menurun hingga 15 dari 195 negara anggota PBB yang saat ini mengakui Taiwan sebagai sebuah negara yang berdaulat (Oncoor, 2019). Hal tersebut disebabkan karena Tiongkok

memberlakukan *One China Policy* yang didukung oleh Amerika Serikat dan beberapa negara di dunia lainnya (Glaser & Green, 2017). Belum diakuiinya Taiwan sebagai sebuah negara oleh sebagian besar negara lain di dunia, mengakibatkan Taiwan tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan beberapa negara. Tidak adanya hubungan diplomatik resmi ini kemudian menjadi kendala besar bagi Taiwan untuk menjalin hubungan diplomatik dan hubungan kerja sama lebih luas. Selain itu, akibat dari *One China Policy* ini membuat banyak negara di dunia dan masyarakat internasional belum bisa mengenal, bahkan membedakan antara Taiwan dengan Tiongkok (McEneaney, 2019). Dengan diberlakukannya *One China Policy* ini, pada akhir tahun 1980-an saat Taiwan dibawah pemerintahan Lee Teng Hui mengenalkan ide diplomasi fleksibel atau *pragmatic diplomacy*. *Pragmatic diplomasi* yaitu dimana ketika diplomasi formal tidak dapat dilakukan dengan negara lain, maka hal yang dapat dilakukan adalah dengan menjalin hubungan substansial yang berarti hubungan dekat tanpa pengakuan diplomatik (Wingkler, 2011).

Taiwan saat ini memiliki hubungan diplomatik resmi hanya dengan 15 negara dan menjalin hubungan subsantif dengan banyak negara seperti Australia, negara-negara Uni Eropa, Jepang, Selandia Baru, Amerika Serikat dan Kanada. Karena tidak adanya hubungan diplomatik resmi dan terbatasnya hubungan dengan negara lain, termasuk dengan negara Kanada, maka *pragmatic diplomacy* tersebut menjadi acuan bagi negara Taiwan untuk menjalin hubungan substansial dengan negara Kanada (Ministry of Foreign Affairs, Republic of China Taiwan, 2020). Dengan terbatasnya hubungan diplomasi antara negara Taiwan dengan beberapa negara lain, membuat Taiwan mencari cara yang efektif yaitu dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki negaranya untuk terus dapat menjaga hubungan diplomatik ataupun hubungan baik terhadap beberapa negara termasuk Kanada.

Sebagai sebuah negara maka penting untuk memiliki identitas atau ciri khas yang dapat mengingatkan akan suatu

negara tersebut yang kemudian dapat menjadi sarana pendukung untuk suatu negara dapat lebih dikenal oleh dunia. Identitas suatu negara dapat berupa kebudayaan, etnis, kesenian dan makanan. Taiwan sebagai negara yang memisahkan diri dari Tiongkok memiliki budaya dan kuliner beragam yang kemudian dapat menjadi media atau sarana untuk berkomunikasi dan berkenalan dengan dunia Internasional yang mana masih dilema akan status negara Taiwan, dimana tujuan dari berkomunikasi adalah untuk mengurangi tingkat ketidakpastian tersebut (Liweri, 2013).

Makanan merupakan simbol representasi yang dapat digunakan untuk mengkomunikasikan ide, nilai, identitas, dan sikap suatu negara (Zhang, 2015). Kaya akan budaya dan keragaman kuliner mendorong Taiwan untuk menjadikan hal tersebut sebagai peluang sarana diplomasi, atau dalam politik disebut sebagai gastrodiplomasi. Pada tahun 2010, Taiwan kemudian memulai program gastrodiplomasi tersebut dengan nama *All in Good Taste: Savor the Flavors of Taiwan*. Program ini berisi upaya Taiwan dalam mengenalkan negara Taiwan pada masyarakat Internasional melalui bidang kuliner dan budaya. Salah satu negara yang dituju untuk dikenalkan pada program ini adalah Kanada. Program ini diharapkan nantinya dapat menjadi sarana dalam menjaga hubungan diplomasi antar kedua negara yaitu Taiwan-Kanada agar terus terjalin dengan baik. Harapannya gastrodiplomasi dapat menjadi salah satu cara yang dianggap efektif untuk membuat Taiwan lebih dikenal di dunia, serta dapat terus menjalin hubungan diplomatik lebih erat dengan beberapa negara terutama Kanada. Adanya program gastrodiplomasi yang dilakukan Taiwan pada tahun 2010 hingga tahun 2013 ini kemudian menarik perhatian penulis untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan Taiwan dalam menjalankan program tersebut.

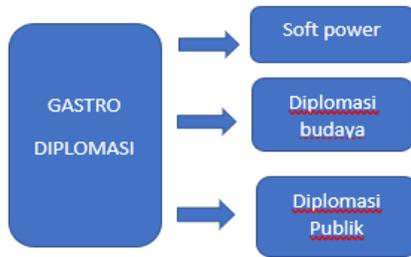
B. Rumusan Masalah

Bagaimana strategi gastrodipomasi yang dilakukan Taiwan dalam memperkuat hubungan diplomasi antara Taiwan - Kanada?

C. Kerangka Konseptual

Soft Power

Soft power menurut Joseph S.Nye adalah sebuah kemampuan untuk melakukan sesuatu dan untuk mengontrol pihak lain serta kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dalam melakukan sesuatu yang belum tentu ingin mereka lakukan (Nye, 2004). Sehingga, *soft power* dapat didefinisikan sebagai sebuah kemampuan suatu negara untuk mempengaruhi perilaku negara lain dengan cara persuasif daripada dengan koersi atau maupun imbalan. *Soft power* ini bersumber dari kebudayaan, nilai-nilai yang dianut dan elemen-elemen *intangibile* lainnya yang menjadi daya tarik (Nye, 2004).



Bagan 1. Korelasi antar konsep

Konsep dari *soft power* adalah untuk mengajak atau menarik pemerintah ikut serta memanfaatkan perwakilan mereka di banyak negara untuk memainkan aturan penting dalam mempromosikan, berbagi dan mendekati orang-orang dari berbagai latar belakang di negara tuan rumah atau *host country*. Dimana budaya adalah salah satu bentuk dan instrumen dari *soft power* dalam berdiplomasi. Diplomasi budaya merupakan usaha suatu negara untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya melalui dimensi kebudayaan, baik secara mikro seperti pendidikan, ilmu pengetahuan, olah raga, dan kesenian, ataupun secara makro sesuai dengan ciri-ciri khas utama, misalnya propaganda dan lain-lain, yang dalam pengertian konvensional dapat dianggap sebagai bukan politik, ekonomi, ataupun militer (Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2019). Diplomasi budaya tidak terbatas pada hubungan antar negara tetapi diperluas yang melibatkan massa publik (Ma, 2015). Budaya merupakan unsur penting dalam diplomasi karena apabila suatu negara dapat mengesankan negara lain dengan warisan kebudayaannya dan kemudian mengeksponnya ke negara atau bagian dunia lain maka hal tersebut dapat memudahkan dalam pembangunan basis yang kuat untuk mendapatkan dukungan atas masalah-masalah lain (Roy, 1995).

Sebagai sebuah negara, Taiwan yang saat ini sebagai *middle power country* karena status negaranya yang belum diakui oleh banyak negara dan adanya isolasi diplomasi maka *soft power* dipilih sebagai langkah dalam mencapai tujuan negaranya dalam memperkuat hubungan diplomatik yaitu dengan gastrodipomasi. Gastrodipomasi termasuk dalam *soft power* dalam berdiplomasi, karena makanan termasuk dalam budaya yang merupakan unsur-unsur dari *soft power*. Taiwan dalam mengenalkan negaranya ke negara lain yaitu dengan menggunakan budaya makanan atau kuliner khas Taiwan dan juga menggunakan aktor non negara yaitu para chef dalam negeri maupun chef internasional untuk memeperkenalkan negara dan kuliner Taiwan. Presiden ke enam Taiwan, Ma Ying-jeou pada tahun 2010 telah meluncurkan kampanye gastrodipomasi senilai US\$34.2 juta di Inggris, Negara Amerika Utara termasuk Kanada, dan Jerman (Booth, 2010).

Gastrodipomasi

Konsep Gastodipomasi menurut Paul Rockower adalah mengacu pada kampanye anatra hubungan masyarakat dan investasi bersama dan berkelanjutan oleh pemerintah dan negara, yang seringkali bekerjasama dengan aktor non negara dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan status merek bangsa mereka melalui makanan (Suntikul, 2019).

Gastrodipomasi dibangun atas makanan sebagai dimensi umum dari kehidupan dan budaya semua orang dan dapat dianggap sebagai jenis diplomasi publik karena tidak memberikan pengaruh dan mengadvokasi secara langsung, tetapi lebih secara tidak langsung dengan menyentuh pada koneksi emosional dimana gastrodipomasi menggunakan rasa untuk meningkatkan kesadaran akan perbedaan budaya unik suatu bangsa (Rockower P. S., 2012).

Gastrodipomasi termasuk dalam diplomasi publik, dimana diplomasi publik merupakan tindakan komunikasi antara pemerintah dengan aktor non-negara terhadap publik asing yang mensyaratkan kemampuan komunikasi antar budaya

untuk tujuan saling pengertian (Djelantik, 2012). Gastrodiplomasi juga membantu dalam mengakrabkan atau membiasakan diri dengan orang asing terutama untuk publik tertentu yang lebih enggan untuk bepergian dan dengan demikian, melalui pengalaman kuliner penonton tersebut dapat menemukan bagian dunia lain (Rockower P. S., 2012). Makanan juga bisa menjadi motivasi utama untuk bepergian ke tujuan atau tempat tertentu (Suntikul W., 2017). Sedangkan dalam buku Komunikasi Lintas Budaya gastrodiplomasi ini termasuk dalam elemen budayawan dalam diplomasi karena menggunakan makanan sebagai alat pengenalan budaya (Samovar, Porter, & McDaniel, 2010), dimana makanan adalah salah satu unsur budaya.

Gastrodiplomasi ini berbeda dengan diplomasi kuliner, konsep dari 'diplomasi kuliner' diartikan sebagai pemanfaatan makanan dan masakan sebagai instrumen untuk menciptakan pemahaman lintas budaya dengan harapan dapat meningkatkan interaksi dan kerjasama (Chapple-Sokol, 2013), dimana diplomasi kuliner menggunakan pengalaman makan dan makan untuk membina hubungan bilateral khususnya dengan pejabat yang sedang berkunjung termasuk kepala negara, duta besar, dan perwakilan nasional lainnya sedangkan gastrodiplomasi bertujuan untuk meningkatkan pengakuan dan pemahaman tentang tradisi kuliner internasional untuk khalayak yang lebih luas dan lebih publik, bukan hanya para diplomat, praktik ini berakar pada seni diplomasi kuliner yang lebih tradisional (Rockower P. S., 2012). Diplomasi ini dapat memberi gambaran akan budaya suatu negara dalam hal makanan, bagaimana makanan tersebut dibuat, disajikan, dan kemudian dapat menjadi symbol identitas budaya suatu negara.

Upaya gastodiplomasi yang dilakukan oleh Taiwan yaitu membuat program *All in Good Taste: Savor The Flavors of Taiwan* dengan menampilkan beberapa jenis makanan *signature* Taiwan seperti *dim sum*, *stinky tofu*, *oyster omelete*, *bubble tea*, *beef noodle soup*, *milkfish soup* (Saputri, 2018).

Dalam memperkenalkan negaranya, pemerintah Taiwan menggunakan makanan Taiwan dan menampilkannya pada event-event atau festival internasional yang diselenggarakan dan dengan dukungan serta bekerjasama oleh organisasi non-profit ataupun masyarakat diaspora Taiwan yang berada di luar negeri. Program gastrodiplomasi ini dilakukan selama tiga tahun dimulai pada tahun 2010 hingga 2013. Salah satu negara yang dipilih oleh Taiwan untuk melaksanakan program tersebut adalah Kanada yaitu di kota Toronto dan Vancouver melalui “TAIWANfest” yang dilaksanakan pada setiap tahunnya yaitu dari tahun 2010 hingga 2013. Selain di luar negeri Taiwan juga membuat *gathering* dan kompetisi memasak di dalam negeri dengan mengajak chefchef internasional terutama asal negara Amerika Utara termasuk Kanada untuk mengikuti perjalanan kuliner di Taiwan dan menjadi host TV “Taste Taiwan” yang kemudian acara ini ditayangkan diberbagai media elektronik dan digital.

D. Hipotesis

Berdasarkan pembahasan diatas Strategi Taiwan dalam memperkuat hubungan diplomasi antara Taiwan dengan Kanada adalah:

1. Taiwan menerapkan kebijakan gastrodiplomasi *All in Good Taste: Savor the Flavor of Taiwan* pada tahun 2010 hingga 2013 di kota Toronto dan Vancouver.
2. Pemerintah Taiwan mengadakan *gathering* untuk chef-chef internasional asal Amerika Utara di Taiwan pada tahun 2013 hingga 2014.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pengumpulan Data

Penulis melengkapi data dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka yang telah dilakukan dengan cara menghimpun data sekunder dalam hal ini diwakili

oleh informasi-informasi dan literatur yang relevan seperti buku-buku hasil pemikiran tokoh, buku-buku panduan lain, berita dari media massa, data elektronik (internet), dan data lainnya yang berhubungan dengan rumusan masalah.

2. Metode Pengolahan Data

Penulis melakukan analisa data dengan menggunakan metode deskriptif. Metode ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi Gastrodiplomasi Taiwan bisa menjadi cara untuk memperkuat diplomasi antara Taiwan dan Kanada.

F. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi Taiwan dalam memperkuat diplomasi dengan Kanada melalui program gastrodiplomasi selama tiga tahun dari tahun 2010 hingga 2013 dan hasil dari program tersebut.

G. Batasan Penelitian

Pembahasan dari penulisan ini dimulai dari tahun 2010 dimana merupakan tahun dimulainya program gastrodiplomasi yang dilakukan oleh Taiwan sampai dengan tahun 2013 yang merupakan tahun terakhir program, serta tahun-tahun selanjutnya sebagai pendukung dari penelitian ini. Fokus dari penelitian ini adalah pada saat diselenggarakannya TAIWANFest di Kanada dan program *chef journey* di Taiwan.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri atas empat bab. Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, landasan konseptual, hipotesa, metode penulisan, tujuan penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua membahas Dinamika Sosial Politik negara Taiwan dan Kanada, *One China Policy*, Hubungan diplomasi

Taiwan-Kanada, *All in Good Taste: Savor the Flavors of Taiwan*.

Bab ketiga membahas bagaimana strategi *soft power* yang dilakukan Taiwan melalui gastrodipomasi selama empat tahun dan hasil dari program gastrodipomasi tersebut.

Bab keempat membahas mengenai hasil dari strategi gastrodipomasi yang dilakukan oleh Taiwan terhadap hubungannya dengan Kanada

Bab kelima membahas mengenai kesimpulan dari keseluruhan bab yang telah dibahas.

BAB II DINAMIKA SOSIAL POLITIK NEGARA TAIWAN DAN KANADA

Pada bab ini membahas mengenai dinamika sosial politik masing-masing negara yaitu Taiwan dan Kanada mulai dari kondisi geografis, pemerintahan, sejarah hingga kondisi ekonomi kedua negara. Kemudian pada sub bab selanjutnya membahas mengenai One China Policy, Hubungan Taiwan dengan Kanada dan penjelasan singkat program gastrodipomasi *All in Good Taste; Savor the Flavors of Taiwan*.

A. Dinamika Sosial Politik Taiwan

2.1 Kondisi geografis negara Taiwan

Taiwan atau secara resmi bernama *The Republic of China (ROC)* dulunya sering disebut *Formosa* merupakan salah satu negara maju di kawasan Asia Timur, beribu kota di Taipei dengan memiliki luas wilayah sekitar 36.197 kilometer persegi, terletak di lepas pantai tenggara China antara Laut China Selatan dan Timur. (Chairul Akhmad, 2014). Dimana Taiwan bagian utara dan timur laut dibatasi oleh Laut Cina Timur, dengan Kepulauan Ryukyu (bagian paling selatan Jepang) di

timur laut. Di sebelah timur terdapat hamparan besar Samudra Pasifik, dan di bagian selatan merupakan Selat Bashi, yang memisahkan Taiwan dari Filipina, kemudian disebelah barat adalah Selat Taiwan (*Formosa*), yang memisahkan Taiwan dari daratan China.

Selain pulau utama dan enam pulau kecil yang berdiri di sebelahnya Pesisir Smudera Pasifik (timur), pemerintah Taiwan memiliki yuridiksi atas 22 pulau di grup Taiwan dan 64 pulau bagian sebelah barat kepulauan P'eng-hu (John C. Copper, 2021).

Taiwan termasuk negara beriklim tropis dengan 20% *land area* Taiwan sebagai kawasan yang dilindungi. Taiwan terletak di sepanjang *Ring of Fire*, dimana terletak persis diantara lempeng tektonik Yangtze, Okinawa dan Filipina, menjadikan Taiwan sebagai negara dengan potensi alam yang subur dan keadaan alam yang kaya akan pegunungan dimana 70% dari pulau tersebut tertutupi oleh pegunungan berhutan yang terjal. Barisan pegunungan membentang sejauh 270km yang kemudian membelah pulau menjadi dua bagian dari utara ke selatan dengan sekitar 240 puncak pegunungan menjulang diatas 3.000 meter. Gunung tertinggi di Taiwan adalah gunung Jade atau Yushan sebagai puncak tertinggi di pulau tersebut yaitu 3.952 meter atau sekitar 2.966 kaki di atas permukaan laut dan gunung tersebut menjadi gunung tertinggi di kawasan Asia Timur. Selain kaya akan pegunungan vulkanik pulau ini juga memiliki dataran tinggi, deretan pantai, dan cekungan. Kepulauan Diaoyutai, yang terletak di timur laut Taiwan, dan sejumlah pulau di Laut Cina Selatan, termasuk pulau di Tungsha (*Pratas*), Nansha (*Spratly*), Shisha (*Paracel*) dan Chungsha (*Macclesfield Bank*), juga merupakan bagian dari wilayah ROC.

Populasi negara Taiwan sekitar 23,59 juta jiwa. Dengan ibu kota Taipei dan kota besar seperti New Taipei City dengan penduduk sebanyak 3,903,700 jiwa, Kaohsiung sebanyak 2,722,500 jiwa, Taichung sebanyak 2,655,500 jiwa dan Tainan

dengan 1,874,700 jiwa (Statistics from Statiscital Bureau, 2020). Sekitar 95% orang Taiwan adalah etnis Han Cina, tetapi nenek moyang mereka bermigrasi ke pulau itu dalam beberapa gelombang dan berbicara dalam bahasa yang berbeda. Sekitar 70% populasinya adalah etnis Hoklo, yang merupakan keturunan pendatang Tionghoa berasal dari Fujian Selatan yang tiba pada abad ke-17 dan 15% lainnya adalah Hakka, keturunan migran dari Tiongkok tengah, terutama dari Provinsi Guangdong. Suku Hakka diperkirakan telah bermigrasi dalam lima atau enam gelombang besar yang dimulai tepat setelah pemerintahan Qin Shihuangdi (246 - 210 SM). Kelompok ketiga Cina daratan tiba di Taiwan setelah Nasionalis Koumintang (KMT) kalah dalam Perang Saudara Cina ke tangan Mao Zedong dan Komunis. Keturunan gelombang ketiga ini, yang terjadi pada tahun 1949, yang kemudian disebut *waishengren* dan membentuk 12% dari total populasi negara Taiwan. Terakhir, 2% dari warga Taiwan adalah orang aborigin, yang terbagi menjadi tiga belas kelompok etnis utama yaitu etnis Ami, Atayal, Bunun, Kavalan, Paiwan, Puyuma, Rukai, Saisiyat, Sakizaya, Tao (atau Yami), Thao, dan Truku. Penduduk asli Taiwan adalah Austronesia, dan bukti DNA menunjukkan bahwa Taiwan adalah titik awal penduduk pulau Pasifik oleh penjelajah Polinesia.

Bahasa resmi Taiwan adalah Mandarin namun, 70% dari populasi etnis Hoklo menggunakan dialek Hokkien dari bahasa Cina Min Nan (Min Selatan) sebagai bahasa ibu mereka. Orang-orang Hakka juga memiliki dialek China mereka sendiri bahasanya juga disebut dengan bahasa Hakka. Mandarin adalah bahasa pengantar di sekolah-sekolah Taiwan, dan sebagian besar program radio dan TV juga disiarkan dalam bahasa resmi. Orang Taiwan Aborigin juga memiliki bahasa mereka sendiri, meskipun sebagian besar dari mereka juga dapat berbicara bahasa Mandarin. Bahasa aborigin ini termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia daripada rumpun Sino-Tibet. Selain itu juga ada beberapa lansia Taiwan yang berbicara bahasa Jepang, sebagai akibat dari masa pendudukan Jepang yang berlangsung

pada tahun 1895 hingga 1945 yang kemudian tidak mengerti bahasa Mandarin. Agama atau kepercayaan utama penduduk Taiwan adalah Budha, Taoism, I Kuan Tao, agama kepercayaan China, Kristen dan Islam.

2.2 Pemerintahan Negara Taiwan

Taiwan atau secara resmi bernama *Republic of China*, adalah sebuah negara dengan pemerintahan demokrasi multipartai. Presiden dan wakil presiden Taiwan dipilih langsung setiap empat tahun. Dalam pemilihan legislatif Taiwan, setiap pemilih memberikan satu surat suara untuk distrik mereka dan satu lagi untuk kursi yang banyak. Dimana hak pilih bersifat universal untuk warga negara yang berusia 20 tahun ke atas. Presiden dan Perdana Menteri Taiwan adalah sebagai kepala pemerintahan dan Presiden legislatif unikameral, yang dikenal sebagai Legislatif Yuan. Badan Legislatif memiliki 113 kursi, termasuk 6 kursi yang disisihkan untuk mewakili penduduk asli Taiwan. Baik anggota eksekutif dan legislatif menjalani masa jabatan selama empat tahun (Szczepanski, 2018).

Presiden dan wakil presiden Taiwan dipilih secara langsung, dengan menjalani masa jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan tambahan. Selain presiden sebagai kepala negara, presiden juga menjabat sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata, mewakili negara dalam hubungan luar negeri, dan diberi wewenang untuk menunjuk kepala empat cabang pemerintahan, termasuk perdana menteri yang memimpin Eksekutif Yuan. Judicial Yuan memiliki tugas yang mengatur pengadilan. Pengadilan tertinggi Taiwan adalah Dewan Hakim Agung dengan 15 anggota. Terdapat juga Control Yuan yang memantau korupsi (Szczepanski, 2018).

Negara Taiwan sejak sepeninggal Presiden pertama Taiwan Chiang Kai-shek 1948-1975 sudah memiliki enam presiden yaitu Yen Chia-khan sebagai presiden kedua menjabat pada tahun 1975-1978 kemudian dilanjutkan oleh Chiang

Ching-kuo sebagai presiden ketiga 1978-1988 merupakan anak dari Chiang Kai-shek. Lee Teng-hui sebagai presiden ke empat Taiwan menjabat pada tahun 1988-2000, Chen Shu-bian 2000-2008 kemudian dilanjutkan presiden ke enam Taiwan adalah Ma Ying-jeou menjabat pada tahun 2008-2016 dan presiden Taiwan saat ini adalah Tsai Ing-wen yang menjabat dari tahun 2016 hingga sekarang (Sawe, 2019).

Selama pelaksanaan pemerintahannya Taiwan setidaknya telah mengalami beberapa perubahan dari pemerintahan otoriter hingga menjadi pemerintahan yang demokratis multipartai. Konstitusi Taiwan diumumkan resmi pada tanggal 1 Januari 1947. Pada awal mulanya setelah berpindahya ke Taiwan, pemerintahan Taiwan di bawah kekuasaan partai Koumintang (KMT) yang beraliran nasionalis ternyata jauh melenceng dari prinsip awal negara yang demokratis. Dimana negara Taiwan mendasarkan pada Tiga Prinsip Rakyat yaitu nasionalisme, demokrasi dan keadilan sosial. Setelah PD II pada masa pemerintahan KMT, Taiwan melaksanakan pemerintahan negara yang otoriter karena alasan situasi politik yang kritis dimana adanya persaingan dengan partai Komunis serta keadaan ekonomi negara yang buruk. Maka, pada 1948 KMT memberlakukan langkah-langkah darurat ekonomi dan militer. Pemerintahan Taiwan yang otoriter di bawah KMT terus mendapat aksi dari kelompok anti pemerintah dan kegagalan mereka di daratan China serta menurunnya dukungan rakyat terhadap pemerintahan Nasionalis, kemudian pemerintah KMT melakukan pemberharuan struktur pemerintahan dengan dimasukkannya orang Taiwan, yang sebelumnya pemerintahan Taiwan dikuasai oleh orang dari daratan China. Kemudian Taiwan mengalami masa pemerintahan transisi ke demokrasi. Pada masa ini memfokuskan pada pembangunan Pulau Taiwan karena pendudukan diri kembali ke daratan China sudah tidak memungkinkan dan dengan fokus pada pemberdayaan orang Taiwan.

Di bawah pemerintahan Presiden Chiang Ching-kuo mulai aktif dalam memasukan orang-orang Taiwan ke posisi

penting di pemerintahan dan dipilihlah Lee Teng-hui sebagai menteri negara. Masuknya orang Taiwan dalam struktur pemerintahan meredakan perseteruan antara orang Taiwan dengan China Daratan (kelompok pendatang) dimana hubungan tidak harmonis ini sudah ada sebelum kepindahan pemerintah ke Taiwan. Semakin besarnya partisipasi dari Orang Taiwan pada sistem pemerintahan menandakan salah satu aspek demokrasi. Pada tahun 1970-an mulai muncul kelompok oposisi dan kemudian terus berkembang. Kelompok non-KMT mengidentifikasikan dirinya dalam Tang-wai atau kelompok di luar partai (Tanasaldy, 2017). Kelompok tersebut terdiri dari faksi moderat dan faksi radikal yang menekankan pemberharuan politik yang bertahap dan konstitusional. Kemudian terdapat faksi lain yang menghendaki gerakan massa yang lebih agresif serta memaksa pemerintah untuk pemberharuan politik dan menghendaki Taiwanisasi dan pemutusan keterkatian emosional dengan daratan China. Melalui proses yang rumit, pada tanggal 28 September 1986 kelompok Tang-wai memberanikan diri untuk mendirikan Partai Demokratik Progresif (*Democratic Progressive Party*) DPP dan kemudian menjadi partai politik pertama selain KMT yang memiliki status ilegal (Tanasaldy, 2017).

Pada masa akhir pemerintahan Presiden Chian Chingkuo telah melakukan banyak pemberharuan seperti efisiensi birokrasi, menghapus peraturan yang bersifat tidak demokratis dan menyelesaikan isu yang berkaitan dengan masa depan Taiwan. Setelah meninggalnya Presiden Chian Chingkuo secara otomatis Lee Teng-hui diangkat menjadi presiden karena sebelumnya menjabat sebagai wakil presiden. Pada pemerintahan Presiden Lee juga lebih meningkatkan demokrasi dan dengan serangkaian kebijakan.

Pada tanggal 23 Januari 1989, Badan Legislatif Taiwan mengesahkan Peraturan Organisasi Kelompok Sipil yang kemudian mengizinkan pembentukan partai politik (Tanasaldy, 2017). Peraturan tersebut kemudian menjadi tanda dari transisi sistem politik Taiwan yang otoriter yang hanya

memperbolehkan satu partai ke sistem politik multipartai yang demokratis dan kompetitif. Dan kini Taiwan telah memiliki sekitar dua belas partai politik yang memiliki kursi di badan Legislatif.

2.3 Sejarah Pembentukan Negara Taiwan

Pada awalnya, Taiwan merupakan sebuah pulau bagian Tiongkok yang berada dibawah kendali Jepang, namun setelah berakhirnya perang dunia kedua, dimana Jepang mengalami kekalahan dan berakhir Taiwan kembali pada kendali Tiongkok yang kemudian Taiwan terus berusaha untuk memisahkan diri dan merdeka dari Tiongkok. Sejarah pemisahan Taiwan dan Tiongkok dimulai pada tahun 1949, karena adanya perbedaan ideologi dan kemudian berakibat perang saudara. Dimana Republik Tiongkok atau Taiwan yang pada saat itu dipimpin oleh Chiang Kai Shek berhaluan nasionalis kalah perang saudara dari Partai Komunis China (*Zhongguo Gongchandang*) dengan pimpinan Mao Zedong dan kemudian mundur ke Taiwan. Mao Zedong kemudian memproklamirkan berdirinya negara baru yaitu Republik Rakyat Tiongkok di Beijing, yang kemudian diubah namanya menjadi Beijing dan selanjutnya ditetapkan sebagai ibukota negara baru. Republik Rakyat Tiongkok kemudian dideklarasikan oleh Mao Zedong sebagai sebuah negara beraliran komunis (Federal Research Division, 2005). Selanjutnya, pemerintahan nasionalis Kuomintang berpindah dari China daratan ke kepulauan bagian tenggara Tiongkok atau sekarang Taiwan karena kalah perang terhadap pasukan komunis dan kemudian Chiang Kai-shek menerapkan sistem pemerintahan darurat dengan asas tunggal satu partai Kuomintang (KMT). Taiwan terus berkembang menjadi kekuatan modern setelah kemenangan Komunis di China daratan pada tahun 1949. Para pendukung Nasionalis China melarikan diri ke Taiwan dan berusaha mendirikan pemerintahan untuk seluruh negara China di pulau itu (Marboen, 2015).

Karena adanya pemisahan diri Taiwan dengan Tiongkok pada tahun 1949, mengakibatkan pada 1971 setelah sidang umum PBB, Taiwan kemudian diakui PBB sebagai bagian dari “Tiongkok” (Wulan, 2020). Hal ini mengakibatkan Taiwan tidak memiliki kursi di PBB karena telah digantikan oleh Tiongkok sebagai wakil dari seluruh China di PBB. Pada tahun 2000 Taiwan mengganti pemerintahannya dari nasionalis ke demokrasi (Taiwan Country Profile, 2019).

2.4 Ekonomi Negara Taiwan

Ekonomi Taiwan adalah salah satu dari "Macan Asia", bersama dengan Singapura, Korea Selatan, dan Hong Kong. Saat ini, Taiwan adalah pusat kekuatan kapitalis dan pengeksportir utama barang elektronik dan produk teknologi tinggi lainnya. Taiwan menempati posisi penting dalam ekonomi global. Taiwan sebagai pemain teratas dalam industri teknologi informasi dan komunikasi dunia serta pemasok utama barang di seluruh spektrum industri. Menurut *World Trade Organization* (WTO), pada tahun 2018 Taiwan adalah eksportir terbesar ke-18 dan pengimpor barang dagangan terbesar ke-17. Taiwan juga merupakan salah satu pemegang cadangan devisa terbesar per-Desember 2018. GDP Taiwan pada tahun 2018 mencapai US \$ 25.004 (Ministry of Foreign Affairs, 2020). Dibawah kebijakan *New Southbound*, Taiwan memperdalam hubungan dengan 10 negara anggota PBB Asia Tenggara, enam negara dengan Asia Selatan, Australia dan Selandia Baru. Mata uang negara Taiwan adalah New Taiwan dollar (NT\$ atau TWD).

B. Dinamika Sosial Politik Negara Kanada

2.1 Kondisi geografis negara Kanada

Kanada adalah sebuah negara yang terletak di benua Amerika Utara yang menempati sekitar dua perlima bagian utara benua Amerika Utara dan beribukota di Ottawa dengan beberapa kota besarnya adalah Toronto, Montreal, Vancouver

dan Calgary. Kanada merupakan sebuah negara terbesar kedua di dunia setelah Rusia, memiliki luas wilayah sekitar 9,984 juta km persegi dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 37,742 juta jiwa (UN Data Canada General Information, 2020). Wilayah Kanada sebelah selatan dan barat berbatasan langsung dengan Amerika Serikat, membentang sepanjang 8.891 kilometer (5.525 mil), yang kemudian menjadikan Kanada sebagai negara dengan perbatasan darat bi-nasional atau berbatasan dengan negara-negara bagian AS terpanjang di dunia (Nicholson, 2020).

Total dari luas daratan Kanada meliputi ribuan pulau yang berdekatan, terutama Newfoundland di timur dan kepulauan Arktik di utara. Kanada juga berbatasan dengan Samudra Arktik di sebelah utara, Greenland di timur laut, Samudra Atlantik di sebelah timur, dengan 12 negara bagian Amerika Serikat di selatan, kemudian di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Pasifik dan negara bagian Amerika Serikat yaitu Alaska. Selain itu, juga berbatasan dengan kepulauan kecil milik Prancis yaitu Saint-Pierre dan Miquelon yang terletak di Newfoundland (IMUNA Education Trough Simulation, 2021).

Negara Kanada berada pada garis bujur yang membentang sekitar 52° hingga 141° barat, dan garis lintang membentang dari 42° hingga 83° utara serta memiliki enam zona waktu (Nicholson, 2020). Karena luasnya garis lintang negara Kanada membuat Kanada memiliki berbagai macam iklim yang dipengaruhi oleh arus laut yang memainkan peran penting. Terdapat perairan hangat Arus Teluk di Atlantik dan Arus Alaska di Pasifik yang dapat mempengaruhi iklim. Angin barat, yang bertiup dari laut ke darat adalah arus udara yang berlangsung di Pasifik dan kemudian membawa curah hujan tinggi serta suhu musim dingin dan musim panas yang sedang di pesisir British Columbia. Di daratan, terdapat Great Lakes dapat mempengaruhi penurunan cuaca di bagian selatan Ontario dan Quebec. Di sebelah timur, Arus Labrador yang dingin bertemu dengan Arus Teluk di sepanjang pantai

Newfoundland dan Labrador mengakibatkan udara dingin dan sering menyebabkan kabut.

Dua pertiga bagian utara negara Kanada memiliki iklim dengan musim dingin yang sangat dingin dan musim panas yang pendek dan sejuk. Daerah selatan Tengah memiliki iklim kontinental yang khas yaitu musim dingin yang sangat dingin, musim panas yang terik, dan curah hujan yang relatif jarang. Sedangkan di Ontario Selatan dan Quebec memiliki iklim dengan musim panas yang lembab dan panas serta musim dingin bersalju yang dingin dan pantai barat seluruh Kanada memiliki musim dingin dengan suhu rata-rata di bawah titik beku dan dengan lapisan salju yang turun terus menerus.

Kelompok etnis Kanada terdiri atas etnis kelompok campuran nasional dengan budaya yang beragam. Pada sensus pertama tahun 1871, sekitar setengah populasinya adalah orang Inggris dan hampir sepertiga adalah orang Prancis. Sejak saat itu, proporsi orang Kanada keturunan Inggris dan Prancis masing-masing turun menjadi sekitar seperempat, karena lebih sedikit orang yang bermigrasi dari Inggris dan Prancis, tetapi jauh lebih banyak yang datang ke Kanada dari negara lain seperti dari Eropa, Asia Tenggara, dan Amerika Latin. Kelompok pendatang cenderung menetap di daerah tertentu yang memiliki kemiripan dengan budaya, keadaan alam dan lingkungan asal negara mereka. Sebagian besar orang asal Ukraina bermigrasi ke Provinsi Prairie, di mana tanah dan iklimnya mirip dengan tanah air mereka dan orang Belanda menetap di tanah pertanian yang datar dan subur di Ontario barat daya, serta banyak orang China, Portugis, Yunani, dan Italia menetap di bagian tertentu kota besar Kanada, khususnya di Toronto, Montreal, dan Vancouver.

Selain itu terdapat kelompok etnis campuran di Kanada yang sangat berbeda dari satu provinsi ke provinsi lain. Proporsi orang yang mengaku sebagai keturunan dari Kepulauan Inggris sekitar dua pertiga yang berada di Newfoundland dan Labrador, kurang dari 5 persen di Quebec. Proporsi orang keturunan Prancis mayoritas berada di Quebec

dan kurang dari 2 persen di wilayah lainya seperti Alberta, British Columbia, Newfoundland, Labarador, wilayah barat laut dan Saskatchewan. Terdapat juga imigran dari Amerika Serikat akibat dari revolusi Amerika di tahun 1775 yang sekarang berada di provinsi Maritim, selatan Quebec dan Ontario (World Atlas Maps Canada, 2020).

Selain etnis pendatang terdapat juga masyarakat asli dimana diperkirakan 200.000 orang India (*First Nation Peoples*) atau Bangsa Pertama dan Inuit tinggal di tempat yang sekarang disebut Kanada pada abad ke-16 bersamaan dengan menetapnya orang Eropa di Kanada (Nicholson, 2020). Selama 200 tahun berikutnya penduduk asli menurun, sebagian besar sebagai akibat dari perambahan wilayah Eropa dan penyakit yang dibawa para pemukim. Kemudian setelah tahun 1950 penduduk asli mengalami peningkatan. Sekitar satu juta orang di Kanada saat ini mengidentifikasi diri mereka sebagai orang India, Métis (keturunan campuran Eropa dan India), dan Inuit. Bahasa yang digunakan oleh penduduk negara Kanada adalah bahasa Inggris dan Prancis sebagai bahasa resmi yang telah ditetapkan oleh konstitusi. Bahasa Inggris menjadi bahasa dominan di sebagian besar negara Kanada, hanya satu provinsi yaitu New Brunswick secara resmi menggunakan dua bahasa. Bahasa Prancis adalah bahasa resmi di provinsi Quebec, di mana bahasa Prancis sebagai bahasa pertama dari empat perlima penduduknya. Sekitar tiga perlima orang Kanada berbicara bahasa Inggris sebagai bahasa pertama mereka dan kurang dari seperempat mengidentifikasi Bahasa Prancis sebagai bahasa utama mereka. Terdapat juga bahasa ibu dari hampir seperlima orang Kanada menggunakan Bahasa selain Inggris atau Prancis; kebanyakan berbicara bahasa Eropa lain (terutama bahasa Italia dan Jerman) dan juga kelompok imigran terbesar yaitu China dengan berbicara bahasa Cina. Selain itu terdapat bahasa asli seperti bahasa Inuit dan Cree.

Kemudian agama atau kepercayaan penduduk Kanada dengan sekitar empat perlima penduduk Kanada mengklaim berafiliasi pada tingkat tertentu pada keyakinan agama yang

terorganisir. Sebagian besar adalah Katolik Roma atau Protestan (Nicholson, 2020). Katolik Roma merupakan kelompok agama terbesar pertama dengan lebih dari dua perlima populasi. Protestan, sebagai kelompok terbesar kedua, berjumlah sekitar tiga persepuluh dari populasi. Terdapat juga penganut agama Islam, Hindu, Sikh dan Budha yang dibawa oleh para imigran yang datang ke Kanada. Selain itu terdapat penganut Yahudi dan penganut kepercayaan Ortodoks Timur.

2.2 Pemerintahan Negara Kanada

Kanada merupakan sebuah negara persemakmuran, dimana mengakui raja atau ratu inggris sebagai kepala negara, berbentuk monarki konstitusional dengan pemerintahan berbentuk demokrasi parlementer dan federasi. Memiliki tiga cabang pemerintahan, pertama yaitu eksekutif; terdiri dari kepala negara yang diwakili oleh gubernur jendral dan perdana menteri yang dianggap sebagai kepala pemerintahan. Cabang kedua yaitu legislatif yaitu parlemen bikameral terdiri dari Senat dan *House of Commons* dan cabang yang ketiga adalah Mahkamah Agung. Negara Kanada saat ini dipimpin oleh kepala negara yaitu Ratu Elizabeth II yang diwakili oleh seorang gubernur jendral. Perdana Menteri Kanada saat ini adalah Justin Trudeau (BBC, 2019).

2.3 Sejarah Pembentukan Negara Kanada

Orang pertama yang tinggal di Kanada adalah Inuit dan *First Nation Peoples* atau India. Orang Eropa pertama yang mencapai negara itu kemungkinan besar adalah Viking dan diyakini bahwa penjelajah Norse Leif Eriksson membawa mereka ke pantai Labrador atau Nova Scotia pada 1000 M. Pemukiman Eropa tidak dimulai di Kanada sampai tahun 1500an (Canada History, 2015). Pada tahun 1534, penjelajah Prancis Jacques Cartier menemukan Sungai St. Lawrence saat mencari bulu, dan kemudian dia mengklaim Kanada sebagai Perancis. Perancis mulai menetap disana pada tahun 1541, pemukiman resmi berdiri pada tahun 1604. Pemukiman itu,

yang disebut Port Royal, terletak di tempat yang sekarang disebut Nova Scotia. Selain Prancis, Inggris juga mulai menjelajahi Kanada untuk perdagangan bulu dan ikan, dimana pada tahun 1670 mendirikan Perusahaan Teluk Hudson. Pada tahun 1713, konflik berkembang antara Inggris dan Prancis yang kemudian dimenangkan Inggris dan memiliki kendali atas Newfoundland, Nova Scotia, dan Teluk Hudson. Dilanjutkan dengan Perang Tujuh Tahun yang dimulai pada tahun 1763, di mana Inggris berusaha untuk mendapatkan lebih banyak kendali atas negara Kanada dan perang itu berakhir pada tahun 1763, yang kemudian Inggris diberi kendali penuh atas Kanada dengan Perjanjian Paris. Pada tahun setelah adanya perjanjian Paris penjajah Inggris kemudian berbondong-bondong datang ke Kanada.

Pada tahun 1849, Kanada diberikan hak untuk pemerintahannya sendiri oleh Inggris namun secara resmi negara Kanada didirikan pada tahun 1867 (Government of Canada Culture & History, 2021). Negara Kanada terdiri dari Kanada Atas atau sekarang wilayah Ontario, Kanada Bawah atau sekarang wilayah Quebec, Nova Scotia, dan New Brunswick. Pada tahun 1869, negara Kanada terus berkembang ketika membeli tanah dari Perusahaan Teluk Hudson. Tanah ini kemudian dibagi menjadi beberapa provinsi, salah satunya adalah Manitoba. Manitoba bergabung dengan Kanada pada tahun 1870 diikuti oleh British Columbia pada tahun 1871 dan Prince Edward Island pada tahun 1873 (Munroe, 2020). Negara ini kemudian terus berkembang lagi pada tahun 1901 dengan bergabungnya Alberta dan Saskatchewan dengan Kanada. Kemudian pada tahun 1949 Newfoundland menjadi provinsi ke-10 di Kanada (Government of Canada Provinces & Territory, 2017).

2.4 Ekonomi Negara Kanada

Perekonomian negara Kanada, pada saat pemukiman awal dan pertumbuhan Kanada adalah bergantung pada

eksploitasi dan ekspor sumber daya alam negara yang melimpah. Selama abad ke-20, industri manufaktur dan jasa menjadi semakin diperhitungkan. Kemudian pada akhir abad ke-20, pertanian dan pertambangan menyumbang kurang dari 5 persen pada tenaga kerja Kanada. Manufaktur menyumbang di seperlima dan jasa, termasuk transportasi, perdagangan, keuangan, dan kegiatan lainnya, mempekerjakan hampir tiga perempat dari tenaga kerja Kanada. Selama bertahun-tahun Kanada mendukung industri manufakturnya melalui tarif perlindungan atas barang-barang manufaktur yang diimpor. Kebijakan ekonomi Kanada lainnya adalah pemberian hibah dan subsidi pemerintah untuk merangsang pembangunan ekonomi di daerah-daerah yang pertumbuhannya lambat yang berlangsung hingga tahun 1980-an. Kepatuhan terhadap aturan internasional tentang perdagangan dan pembentukan kawasan perdagangan bebas dengan Amerika Serikat (1989) dengan adanya penerapan Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA) pada 1994 mengakibatkan berkurangnya perlindungan bagi pabrik manufaktur Kanada. Pendanaan untuk program pembangunan ekonomi daerah juga berkurang. Beberapa perusahaan multinasional telah merelokasi pabrik mereka ke negara-negara yang biayanya lebih murah, menyebabkan hilangnya pekerjaan dan ketidakpuasan politik di Kanada. Ekonomi Kanada didominasi oleh sektor swasta, dan beberapa perusahaan seperti layanan pos, listrik, dan beberapa layanan transportasi tetap dimiliki oleh publik. Selama tahun 1990-an beberapa industri nasional Kanada diprivatisasi. Pertanian Kanada sepenuhnya swasta, tetapi bergantung pada subsidi pemerintah untuk bersaing dengan sektor pertanian yang bersubsidi di Uni Eropa (UE) dan Amerika Serikat. Mata uang negara Kanada saat ini adalah dollar Kanada. Pada tahun 2018 GDP negara Kanada mencapai \$2,222.58 dan dengan GDP per kapita sebesar \$60,078.85 (Taiwan Canada Economic Information, 2020).

C. *One China Policy* (Kebijakan Satu China)

One China Policy adalah sebuah kebijakan yang diterapkan oleh Tiongkok bahwa hanya ada satu negara China di dunia dan klaim Tiongkok atas wilayah Taiwan bahwa wilayah Taiwan masih dalam teritori Tiongkok. Akibat dari kebijakan ini aktivitas diplomasi Taiwan terbatas, dimana negara-negara lain yang ingin berkerjasama dengan Tiongkok harus memutuskan hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan, serta mengakui bahwa Tiongkok adalah negara yang mewakili seluruh China dan wilayah Taiwan adalah merupakan wilayah milik Tiongkok.

Awalnya pulau Formosa atau Taiwan ini dulunya milik Tiongkok namun, karena adanya perang antara Tiongkok dan Jepang (*Sino-Japanese War*) berlangsung pada tahun 1894 yang kemudian dimenangkan oleh Jepang dan munculah perjanjian perdamaian yang di kenal sebagai Perjanjian Shimonoseki dengan Jepang ditandatangani oleh pemerintah Qing di China. Perjanjian tersebut berisi penyerahan atas pulau Formosa kepada Jepang. Kemudian pada tahun 1941 pemerintah Tiongkok menyatakan perang terhadap Jepang, dan pada saat yang sama mengeluarkan proklamasi yang membatalkan semua perjanjian dengan Jepang, termasuk Perjanjian Shimonoseki. Adanya klaim atas Taiwan oleh Tiongkok ini merupakan hasil dari berakhirnya perang dunia ke II, dimana pada tahun 1945 Jepang menyerah kepada sekutu kemudian Jepang menyerahkan kembali Taiwan kepada Tiongkok.

Setelah pulau Formosa atau Taiwan ini kembali ke Tiongkok, terjadilah perang saudara di daratan China akibat campur tangan asing. Perang saudara ini dilancarkan oleh Koumintang sebagai perang anti Jepang dan kemudian mendapat kemenangan atas anti Jepang. Pada tahun 1949, Koumintang yang dipimpin oleh Chiang Kai-sek yang berhaluan nasionalis yang mendapat dukungan Amerika kalah perang dengan Komunis Tiongkok yang dipimpin oleh Mao

Zedong. Karena kekalahannya melawan Komunis Tiongkok, pada tahun 1949 Chiang Kai-sek dan pemerintahannya mengungsi ke pulau Formosa atau sekarang secara resmi bernama Republik of China/Taiwan. Kemudian Mao Zedong memproklamasikan berdirinya negara baru yaitu Republik Rakyat Tiongkok di Beijing dan menjadikan Beijing sebagai ibukota negara baru dengan nama yang baru juga yaitu Beijing.

Sejak didirikannya negara Tiongkok pada 1 Oktober 1949, pemerintah Tiongkok telah menguasai sebagian besar daratan China dan kemudian daerah pinggiran seperti pulau Hainan, Tibet, Xingjiang juga sudah berhasil direbut oleh Tiongkok. Sejak saat itu juga Tiongkok telah mengklaim wilayah dan kedaulatan atas Taiwan yang telah diduduki pemerintah Taiwan sejak 1949 (Tanasaldy, 2017). Setelah kekalahan KMT yang kemudian mundur ke Taiwan menjadikan telah lama sepenuhnya kehilangan haknya untuk menjalankan kedaulatan negara atas nama China dan pada kenyataannya selalu menjadi otoritas lokal di wilayah Tiongkok. Disinilah sebagai kemunculan permasalahan yaitu dualisme pemerintahan China yang berlangsung hingga saat ini.

Sejak berdirinya kedua negara pada tahun 1949 baik Taiwan maupun Tiongkok menerapkan Kebijakan Satu China (*One China Policy*) dan kemudian menegaskan bahwa hanya ada satu negara China di dunia. Padahal pada kenyataannya terdapat dua negara dan dua pemerintahan. Kedua negara juga menerapkan doktrin Hallstein yang mengakibatkan suatu negara tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain yang telah menjalin hubungan diplomatik dengan rivalnya

(Tanasaldy, 2017). Dengan pengakuan diplomatik yang pada awalnya dimenangkan oleh Taiwan menjadikan pemerintah Taiwan menerapkan kebijakan politik luar negeri yang nonkompromistis dengan Tiongkok. Nonkompromistis ini diwujudkan dengan menerapkan kebijakan Satu China yang kaku dimana Taiwan enggan mengakui keberadaan negara

Tiongkok, tidak mengadakan hubungan apapun dengan Tiongkok, serta memutus hubungan diplomatik dengan negara yang mengakui kedaulatan Tiongkok dan akan keluar dari organisasi internasional apabila Tiongkok diterima sebagai anggota organisasi tersebut (Tanasaldy, 2017).

Namun dunia perpolitikan internasional terus mengalami perubahan yang kemudian mempengaruhi dukungan atas Taiwan. Pada akhir 1980-an, Tiongkok muncul sebagai salah satu negara terkuat di daratan Asia Timur (Liu, 2008). Dimana dukungan negara-negara di dunia sekarang ini semakin banyak condong kepada rivalnya yaitu Tiongkok serta dipengaruhi juga oleh Tiongkok yang diterima menjadi anggota PBB menggantikan posisi Taiwan. Dengan dukungan yang diterima Tiongkok semakin banyak dan menjadikan posisinya kuat kemudian semakin kukuh juga Tiongkok dalam menerapkan kebijakan Satu China.

Tiongkok secara tegas tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Taiwan. Dengan posisi yang berubah menjadikan Taiwan semakin melunak dan mentolerir kondisi “dua China” di dalam hubungan diplomatik atau statusnya di organisasi Internasional. *One China Policy* ini bagi Tiongkok memiliki tujuan untuk penyelesaian masalah Taiwan dan realisasi penyatuan kembali Tiongkok dalam mewujudkan kepentingan fundamental bangsa Tiongkok. Sejak 1979, pemerintah Tiongkok telah mengupayakan penyatuan kembali China secara damai dalam bentuk *One State, Two System* atau "satu negara, dengan dua sistem". Pertukaran ekonomi dan budaya dan kontak orang-ke-orang antara kedua sisi Selat Taiwan telah membuat kemajuan pesat sejak akhir tahun 1987.

Namun Taiwan terus berupaya untuk mengembalikan posisi atau kedudukan internasionalnya. Pada tahun 1988 saat Taiwan dibawah pemerintahan Presiden Lee Teng-hui mengeluarkan langkah-langkah pragmatis dengan berusaha mencoba membuka kembali hubungan diplomatik yang terputus, menjalin hubungan diplomatik yang baru dan kembali

bergabung dengan organisasi antar pemerintah regional maupun global dan dilaksanakan tanpa melihat apakah negara atau organisasi tersebut telah memiliki hubungan dengan Tiongkok. Kemudian pada tahun 1990-an, Presiden Lee Tenghui terus mengupayakan gerakan kemerdekaan Taiwan yang semakin jauh dari Prinsip Satu-China, Lee Teng-hui berjuang untuk mempromosikan kebijakan separatist dengan "dua China" dan secara terbuka menggambarkan hubungan lintas-selat sebagai "hubungan antar negara, atau setidaknya hubungan antar negara bagian"(David Allen, 2002).

Dari awal kemerdekaan Tiongkok hingga sekarang, pemerintah Tiongkok secara konsisten tetap menganut Prinsip Satu-China dan dengan tegas menentang segala upaya untuk memisahkan Taiwan dari Tiongkok. Beijing tetap menganggap Taiwan sebagai provinsi pemberontak China dan provinsi yang akhirnya akan bersatu kembali dengan daratan (David Allen, 2002). Dalam Buku Putih 2000, pemerintah Tiongkok merumuskan istilah "prinsip satu China" yang diklaim bahwa Taiwan adalah bagian dari China. Secara umum, pemerintah Tiongkok mengklaim pulau Taiwan atas tiga alasan: kepemilikan historis, pencabutan Perjanjian Shimonoseki, dan Deklarasi Kairo (US, 2008).

Pada saat Taiwan pada saat di bawah pemerintahan Presiden KMT Ma Ying-jeou yang menjabat sebagai presiden Taiwan sejak 2008-2016 telah menghasilkan banyak kemajuan dalam hubungan kerjasama bilateral antara kedua negara. Tiongkok dan Taiwan memiliki lebih dari 20 pemahaman bilateral, yang mencakup berbagai hal mulai dari penerbangan langsung antara Taiwan dan daratan China, pergerakan turis, pertukaran pelajar, perpajakan, kemitraan ekonomi, dan aspek lainnya. Bahkan ada pertemuan "tidak resmi" menurut artikel thediplomat yang inovatif antara Ma dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Singapura pada November 2015, itu menjadi pertemuan pertama antara Taiwan dengan Tiongkok sejak 1945 (Stephens, 2016). Dialog dan pemahaman bilateral ini dikembangkan atas dasar penerimaan oleh kedua belah pihak

atau "Konsensus 1992" di mana Tiongkok dan Taiwan mengakui bahwa ada "satu China", tetapi dengan definisi yang berbeda dan status hubungan negara antara Taiwan dengan Tiongkok tetap dengan *status quo*.

D. Hubungan Taiwan-Kanada

Pada awalnya hubungan antara Taiwan dan Kanada dimulai pada tahun 1942 namun, setelah diberlakukannya *One China Policy* pada tahun 1970 Kanada telah mengakui secara resmi bahwa pemerintah Tiongkok sebagai satu-satunya pemerintahan dan wakil yang sah atas seluruh China (Summary the People's Republic of China Diplomatic Relations, 2013). Dengan adanya klaim Tiongkok atas Taiwan, negara Kanada dalam menyikapi hal ini adalah bersikap netral tanpa mendukung atau menentang posisi ini.

Hubungan antara negara Kanada dan Taiwan kemudian hanya dapat menjalin hubungan bilateral tidak resmi atau hubungan substantif antara kedua negara yang mengakibatkan masing-masing negara tidak memiliki kantor kedutaan besar dan digantikan dengan kantor-kantor perwakilan atau kedutaan *de facto*. dikarenakan adanya *One China Policy* ini, dimana Tiongkok memberi syarat kepada negara-negara yang ingin bekerjasama atau menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok harus memutuskan hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan. Namun, sejak 1986 hubungan kedua negara tetap menjalin ikatan yang kuat dalam hal perdagangan dan budaya.

Saat ini, Taiwan telah memiliki kantor ekonomi dan kebudayaan (*Taipei Economic & Culture*) di Kanada tepatnya di kota Ottawa, dua kantor lainnya berada di Vancouver dan Toronto. Chen Winston Wen-yi adalah sebagai perwakilan luar negeri dari Kantor Ekonomi dan Kebudayaan Taipei di Kanada. Terdapat juga kantor Dewan Pengembangan Eksternal Taiwan (*Taiwan External Trade Development Council*) yang berarada di kota Toronto dan Vancouver (ROC Embassies and Missions

Abroad, 2016). Pemerintah Kanada juga mendirikan kantor perdagangan di Taiwan (*Le Bureau commercial du Canada à Taipei*) tepatnya berada di kota Taipei berdiri pada tahun 1986 dengan Jordan Reeves sebagai direktur eksekutif (Canada and The World, 2018). Kantor-kantor tersebut kemudian menjadi kedutaan *defacto*. Kedutaan *defacto* adalah kantor atau organisasi yang berfungsi secara *defacto* sebagai kedutaan jika tidak ada hubungan diplomatik normal atau resmi antar negara, yang biasanya untuk mewakili negara-negara yang tidak memiliki pengakuan diplomatik penuh, wilayah atau ketergantungan negara, atau wilayah di mana kedaulatan sedang diperdebatkan (Jiang, 2018).

Pada akhir tahun 1980-an, banyak orang Taiwan berimigrasi ke Kanada, terutama di kota Vancouver, British Columbia, dan ke kota-kota yang berdekatan seperti Burnaby, Richmond, dan Coquitlam untuk membentuk komunitas permanen Taiwan-Kanada. Wilayah metropolitan seperti Greater Vancouver sekarang memiliki komunitas Taiwan terbesar di Kanada. Terdapat juga komunitas Taiwan yang mapan di Toronto. Data penduduk tetap negara Kanada yang bersal dari Taiwan menurut data Tinjauan Imigrasi; Penduduk Permanen dan Sementara pada tahun 2009 sebanyak 2.543 jiwa dimana ada lebih dari seratus ribu orang Taiwan yang telah memperoleh kewarganegaraan atau status tinggal permanen di Kanada (Facts and figures 2009 – Immigration overview: Permanent and temporary residents, 2009). Pada tahun 2019, Taiwan menjadi mitra dagang terbesar ke 13 di Kanada dan kelima di Asia dan dengan sektor utama Kanada di Taiwan adalah kedirgantaraan, teknologi informasi, bioteknologi, energi seperti minyak mineral, batu bara, bijih logam, aspal, nikel, produk agri-food dan makanan laut serta daging, dan alat transportasi yaitu kereta api (Buerau of Foreign Trade , 2019).

Sebaliknya, Kanada menjadi pemasok produk agribisnis dan makanan laut terbesar kesebelas di Taiwan pada tahun 2018 yang mewakili pangsa pasar 2,1%. Kanada adalah konsumen produk agribisnis dan makanan laut terbesar kedua

belas di Taiwan pada tahun 2018 yang mewakili pangsa pasar 1,6%. Impor agri-food dan makanan laut Kanada dari Taiwan bernilai sebesar US \$ 98,2 juta pada tahun 2018. Tiga komoditas teratas yang diimpor oleh Kanada dari Taiwan adalah olahan makanan, sotong & cumi-cumi dan produk roti (Market Overview – Taiwan, 2019).

Ekspor impor negara Kanada dan Taiwan dengan rata-rata setiap tahunnya mengalami peningkatan dimulai pada tahun 2015 hingga 2019. Berikut data ekspor dan impor perdagangan Taiwan dan Kanada Tahun 2015-2019:

Tahun	Ekspor	Impor
2015	\$1,457,131,173	\$5,456,189,509
2016	\$1,585,327,308	\$5,077,745,872
2017	\$1,693,914,806	\$5,441,937,768
2018	\$1,996,346,856	\$5,879,879,832
2019	\$2,040,637,111	\$5,967,977,426

(Catatan: dalam dolar Kanada)

Table 2.1 Data jumlah ekspor impor negara Taiwan dan Kanada pada tahun 2015-2019.

Jenis	Ekspor	Impor

Animal & Prod	\$193,809,317	\$35,208,964
Vegetable Prod	\$72,938,279	\$38,677,168
Fats, Oil & Waxes Prod	\$12,098,590	\$2,918,097
Food Prod	\$69,688,241	\$80,976,358
Mineral Prod	\$738,311,691	\$24,549,457
Chemical Prod	\$170,994,073	\$112,260,647
Plastics, Rubber Prod	\$17,389,748	\$442,835,114
Leather, Fur Prod	\$4,591,505	\$10,785,159

Wood Prod	\$77,788,458	\$6,950,156
Paper Prod	\$131,709,479	\$29,548,846
Textiles Prod	\$5,582,923	\$116,157,781

Dress Accs	\$950,641	\$19,482,346
Glass & Stone Prod	\$1,113,840	\$36,856,327
Precious Metal/ stone	\$1,015,927	\$48,704,622
Base Metal Prod	\$224,883,890	\$1,187,604,161
Mach.Mech.E lec Prod	\$114,947,719	\$2,693,934,302
Vehicles and Equip.	\$138,902,818	\$594,213,735
Specialized Inst.	\$50,632,147	\$187,767,733
Arms and Ammunition	\$120,783	\$9,179,814
Misc.Articles	\$5,660,110	\$278,478,908
Antiques	\$221,344	\$287,489

Table 2. 2 Jenis produk perdagangan Taiwan dan Kanada pada tahun 2019.

Ekspor Kanada ke negara Taiwan pada tahun 2019 memiliki total sejumlah \$ 2.040.637.111 dan Impor yang dilakukan negara Kanada dari negara Taiwan memiliki total sejumlah \$ 5.967.977.426 sedangkan untuk investasi pada tahun 2018 oleh kedua negara dengan FDI di Kanada sejumlah

\$ 76 juta dan CDI in Taiwan sejumlah \$ 328 juta dolar Canada (Taiwan Canada Economic Information, 2020).

E. All in Good Taste: Savor the Flavors of Taiwan

All in Good Taste: Savor the Flavors of Taiwan merupakan program gastrodiplomasi yang dilakukan negara Taiwan pada tahun 2010, ketika Taiwan berada dibawah pemerintahan presiden ke-6 mereka yaitu presiden Ma Ying Jeou. Dimana program ini berlangsung selama tiga tahun dimulai pada tahun 2010 hingga 2013. Program ini dilaksanakan bersama Kementrian Ekonomi Taiwan dengan menginvestasikan dana sebesar NT\$1,1 miliar (US \$34,2juta) (Booth, 2010). Program ini sesuai dengan kebijakan luar negeri Taiwan dibawah pemerintahan presiden Ma Ying Jeou, menurut *Foreign Policy Report, Congress of the Legislative Yuan 2010-2013* yang setiap tahunnya terus berfokus pada diplomasi publik dan terus untuk mempromosikan diplomasi budaya bahwa diplomasi fleksibel berakar pada pragmatisme, dan komponen intinya adalah soft-power (Council, 2010).

Program gastrodiplomasi ini memiliki tujuan untuk mempromosikan masakan atau kuliner negara Taiwan di kancah global. Sebagai bagian dari kampanye, Taiwan akan menjadi tuan rumah festival kuliner internasional dan dalam mempromosikan kulinernya pemerintah Taiwan bekerjasama dengan beberapa organisasi non-profit yang berada di luar negeri dengan menyelenggarakan festival makanan Taiwan yang dihadiri oleh publik asing maupun diaspora di luar negeri dan juga melibatkan restoran atau kedai asal Taiwan untuk ikut serta dalam festival tersebut. Pemerintah Taiwan juga mengadakan kompetisi memasak di dalam negeri yang diikuti oleh para chef asing yang nantinya bertujuan untuk memperkenalkan negara Taiwan sebagai pusat kuliner di Asia serta untuk memperkenalkan budaya Taiwan di kancah global. Selain itu pemerintah Taiwan mendukung pengiriman koki

lokal untuk mengasah keterampilan kuliner mereka di kompetisi kuliner global.

Inisiatif ini juga bertujuan untuk mendukung pengenalan restoran Taiwan di luar negeri, dengan fokus pada pusat perbelanjaan dan department store besar di luar negeri dan mengadakan tempat pengambilan sampel untuk masakan Taiwan di bandara internasional. Program gastrodiplomasi diharapkan memungkinkan bisnis lokal untuk mendirikan 3.500 restoran di Taiwan dan luar negeri, dan menghasilkan hampir NT \$ 2 miliar dalam investasi swasta. Program ini juga memiliki tujuan untuk menunjukkan kepada dunia perbedaan antara Taiwan dan Tiongkok, tetapi juga karena Taiwan ingin menghilangkan citra sebagai negara produsen produk elektronik berteknologi tinggi (Rockower P., *The Gastrodiplomacy Cookbook*, 2011). Pelaksanaan program ini diadakan di Inggris, Amerika Utara, Kanada, Jerman dan beberapa negara lainnya.